

EKSPLORASI KEBIJAKAN BAHASA DAN PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA

**Nur Madinah¹, Adezoya Shifa Sabilila², Khanifah³, Adam Sayid Panggeda⁴
,Muasomah⁵, Abdul Mukhlis⁶**

Tadris Bahasa Indonesia, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid, Pekalongan

e-mail: nur.madinah@mhs.uingusdur.ac.id¹, adezoya.shifa.sabilila@mhs.uingusdur.ac.id²,
khanifah23067@mhs.uingusdur.ac.id³, adam.sayid.panggeda@mhs.uingusdur.ac.id⁴,
muasomah@uingusdur.ac.id⁵, abdul.mukhlis@uingusdur.ac.id⁶

Diterima : 16 April 2025 Disetujui : 22 Mei 2025 Dipublikasikan : 27 Juni 2025

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterkaitan yang erat antara kebijakan bahasa dan pendidikan nasional di Indonesia sebagai dua komponen fundamental dalam membentuk arah pembangunan bangsa. Kebijakan bahasa yang dibahas meliputi aspek perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa, yang mencakup bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa daerah sebagai warisan budaya, serta bahasa asing sebagai sarana komunikasi global. Implementasi kebijakan bahasa tersebut mencakup berbagai ranah, seperti media massa, sistem pendidikan formal dan nonformal, sistem peradilan dan administrasi publik, serta pergaulan di tingkat internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang diperkuat dengan metode studi pustaka secara mendalam. Kajian ini menelaah berbagai dokumen kebijakan, hasil riset terdahulu, regulasi pemerintah, serta pemikiran para ahli bahasa dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bahasa dan pendidikan saling berkaitan secara dinamis dalam membentuk identitas kolektif bangsa, memperkuat nasionalisme, serta membekali peserta didik dengan kompetensi kebahasaan dan karakter yang relevan dengan tuntutan zaman. Kebijakan bahasa yang terintegrasi dalam sistem pendidikan mampu meningkatkan kemampuan literasi siswa, memperkaya wawasan kebangsaan, serta menumbuhkan sikap toleransi terhadap keberagaman budaya dan bahasa lokal. Selain itu, pendidikan yang didukung oleh kebijakan bahasa yang kuat dapat menjadi sarana untuk menyosialisasikan ide-ide kebangsaan, memperluas akses pembelajaran, dan menyiapkan generasi muda yang adaptif, kreatif, dan berorientasi global. Diperlukan sinergi berkelanjutan antara kebijakan kebahasaan dan sistem pendidikan nasional untuk menciptakan masyarakat yang cakap secara linguistik, tangguh secara moral, dan unggul dalam persaingan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Upaya ini menjadi bagian dari strategi kebudayaan nasional untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai lokal dalam pusaran modernisasi dan globalisasi

Kata kunci: Kebijakan Bahasa, Pendidikan Nasional, Identitas Budaya, Literasi, Karakter

Abstract

This article aims to explore the close relationship between language policy and national education in Indonesia as two fundamental components in shaping the direction of national development. The language policy discussed includes aspects of language planning, development, fostering, and protection, which include Indonesian as the national language, regional languages as cultural heritage, and foreign languages as a means of global communication. The implementation of the language policy covers various domains, such as mass media, formal and non-formal education systems, the judicial system and public administration, and international relations. This study uses a descriptive qualitative approach strengthened by an in-depth literature study method. This study examines various policy documents, previous research results, government regulations, and the thoughts of language and education experts. The results of the study show that language and education policies are dynamically interrelated in forming the nation's collective identity, strengthening nationalism, and equipping students with language and character competencies that are relevant to the demands of the times. Language policies that are integrated into the education system can improve students' literacy skills, enrich national insight, and foster an attitude of tolerance towards cultural diversity and local languages. In addition, education supported by a strong language policy can be a means to socialize national ideas, expand access to learning, and prepare a young generation that is adaptive, creative, and globally oriented. Ongoing synergy is needed between language policies and the national education system to create a society that is linguistically competent, morally resilient, and superior in global competition without losing its identity as the Indonesian nation. This effort is also part of the national cultural strategy to maintain the sustainability of local values in the midst of modernization and globalization.

Keywords: Language Policy, National Education, Cultural Identity, Literacy, Character

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk peradaban suatu bangsa. Melalui pendidikan, manusia dibimbing untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan transfer pengetahuan, tetapi juga transformasi nilai, pembentukan karakter, dan pembudayaan perilaku yang mencerminkan kepribadian luhur. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, dan pada ayat (3) dinyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan tujuan fundamental pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Untuk mencapainya, diperlukan kebijakan yang terstruktur dan adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan. Bahasa memegang peranan strategis sebagai alat komunikasi, sarana pengantar pendidikan, serta simbol identitas nasional. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan bahasa dan pendidikan menjadi penting dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tulisan ini mengangkat eksplorasi kebijakan bahasa Indonesia dan pendidikan nasional melalui tiga fokus utama: kebijakan bahasa, problematika dan penguatan sistem pendidikan, serta keteladanan tokoh pendidikan nasional.

Pendidikan nasional yang diidealkan bukanlah semata-mata bertujuan mencetak individu yang unggul secara akademis, tetapi juga membentuk manusia Indonesia yang utuh cerdas secara intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakan pendidikan harus mampu merespons dinamika sosial, tantangan global, serta perkembangan teknologi, namun tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa. Dalam konteks ini, bahasa memiliki posisi strategis sebagai medium utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembentukan identitas kebangsaan. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi dalam proses belajar mengajar, tetapi juga berfungsi sebagai pengikat persatuan dalam keragaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Bahasa, sebagaimana pendidikan, merupakan alat transformasi sosial. Oleh karena itu, kebijakan kebahasaan di Indonesia harus diarahkan pada pengembangan, pembinaan, dan perlindungan terhadap bahasa Indonesia, sekaligus memberi ruang bagi pelestarian bahasa daerah dan penguasaan bahasa asing. Ketiga aspek ini membentuk spektrum kebijakan kebahasaan yang saling melengkapi dalam membangun masyarakat multibahasa yang kompeten, toleran, dan

berwawasan global. Di sisi lain, tantangan dalam dunia Pendidikan nasional seperti ketimpangan akses, rendahnya kualitas pengajaran, dan lemahnya budaya

literasi, menjadi perhatian utama dalam upaya transformasi pendidikan. Tulisan ini disusun untuk mengeksplorasi secara mendalam keterkaitan antara kebijakan bahasa dan pendidikan nasional, serta bagaimana keduanya saling memengaruhi dalam mencapai tujuan pendidikan Indonesia.

Fokus pembahasan diarahkan pada tiga ranah utama, yaitu: (1) pendidikan nasional dan tantangannya, (2) kebijakan bahasa Indonesia dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta (3) biografi tokoh pendidikan nasional sebagai sumber inspirasi dan nilai luhur dalam pengembangan sistem pendidikan berbasis karakter dan budaya bangsa. Melalui pemetaan konseptual dan deskriptif terhadap kebijakan bahasa serta sistem pendidikan nasional, diharapkan muncul pemahaman yang komprehensif dan reflektif tentang pentingnya sinergi kebijakan ini dalam menciptakan bangsa yang literat, kompeten, berdaya saing global, dan tetap kokoh dalam jati diri keindonesiaan.

Bahasa, sebagaimana pendidikan, merupakan alat transformasi sosial. Oleh karena itu, kebijakan kebahasaan di Indonesia harus diarahkan pada pengembangan, pembinaan, dan perlindungan terhadap bahasa Indonesia, sekaligus memberi ruang bagi pelestarian bahasa daerah dan penguasaan bahasa asing. Ketiga aspek ini membentuk spektrum kebijakan kebahasaan yang saling melengkapi dalam membangun masyarakat multibahasa yang kompeten, toleran, dan berwawasan global. Di sisi lain, tantangan dalam dunia pendidikan nasional seperti ketimpangan akses, rendahnya kualitas pengajaran, dan lemahnya budaya literasi, menjadi perhatian utama dalam upaya transformasi pendidikan. Tulisan ini disusun untuk mengeksplorasi secara mendalam keterkaitan antara kebijakan bahasa dan pendidikan nasional, serta bagaimana keduanya saling memengaruhi dalam mencapai tujuan pendidikan Indonesia. Fokus pembahasan diarahkan pada tiga ranah utama, yaitu: (1) pendidikan nasional dan tantangannya, (2) kebijakan bahasa Indonesia dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta (3) biografi tokoh pendidikan nasional sebagai sumber inspirasi dan nilai luhur dalam pengembangan sistem pendidikan berbasis karakter dan budaya bangsa. Melalui pemetaan konseptual dan deskriptif terhadap kebijakan bahasa serta sistem pendidikan nasional, diharapkan muncul pemahaman yang komprehensif dan reflektif tentang pentingnya sinergi kebijakan ini dalam menciptakan bangsa yang literat, kompeten, berdaya saing global, dan tetap kokoh dalam jati diri keindonesiaan.

Kebaruan (novelty) dari kajian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan dimensi kebijakan bahasa dengan kebijakan pendidikan nasional secara simultan. Jika penelitian terdahulu cenderung membahas keduanya secara terpisah, tulisan ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan bahasa tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan pendidikan dan karakter bangsa. Selain itu, kajian ini menghadirkan biografi tokoh pendidikan nasional sebagai sumber inspirasi yang jarang diangkat dalam konteks analisis kebijakan, sehingga menghasilkan sintesis yang lebih komprehensif dan relevan untuk menjawab tantangan globalisasi sekaligus memperkuat identitas kebangsaan

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan resmi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kajian dilakukan melalui penelaahan aspek-aspek kebijakan bahasa (nasional, asing, daerah, media, pendidikan, hukum, dan internasionalisasi), serta eksplorasi sistem pendidikan nasional melalui Rapor Pendidikan, analisis masalah pendidikan, dan biografi tokoh pendidikan. Analisis data dilakukan secara tematik untuk menemukan keterkaitan dan relevansi antar variabel dalam konteks kebijakan kebahasaan dan pendidikan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan bahasa yang di eksplorasi meliputi berbagai aspek, mulai dari kebijakan bahasa nasional, bahasa asing, hingga bahasa daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan bahasa dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, hukum, dan administrasi publik.

- a) Aspek-aspek kebijakan bahasa meliputi:
- b) Kebijakan Bahasa Nasional
- c) Kebijakan Bahasa Asing

- d) Kebijakan Bahasa Daerah
- e) Kebijakan Bahasa dalam Pendidikan
- f) Kebijakan Bahasa dalam Hukum dan Administrasi Publik
- g) Kebijakan Bahasa dalam Media
- h) Kebijakan Bahasa dalam Internasionalisasi Bahasa Indonesia
- i) Kebijakan Bahasa Nasional

Kebijakan bahasa nasional merupakan elemen krusial dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa pemersatu yang berperan vital dalam menyatukan berbagai suku dan bahasa lokal di seluruh wilayah Nusantara. Konstitusi melalui Pasal 36 UUD 1945 secara tegas menetapkan bahwa "Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia," yang memberikan dasar hukum bagi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus resmi negara. Perumusan kebijakan bahasa nasional dimaksudkan untuk menjamin pemakaian bahasa Indonesia secara menyeluruh dan tepat dalam setiap aspek kehidupan sosial, kenegaraan, dan kebangsaan.

Kebijakan bahasa ini meliputi tiga unsur utama:

1. Pengembangan. Unsur ini berfokus pada upaya memperkaya, memperluas fungsi, serta menyesuaikan bahasa Indonesia dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Melalui pengembangan, bahasa Indonesia tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan daya ungkap dan daya serapnya agar mampu menjadi bahasa modern yang adaptif.
2. Pembinaan. Unsur ini menekankan pentingnya penanaman sikap positif masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembinaan dilakukan melalui pendidikan formal, sosialisasi, dan pembiasaan penggunaan bahasa dalam ruang publik, termasuk media massa dan komunikasi resmi pemerintahan.
4. Perlindungan. Unsur ini bertujuan menjaga bahasa Indonesia dari penyalahgunaan serta dominasi bahasa asing yang berlebihan. Perlindungan juga mencakup usaha pelestarian bahasa daerah sebagai bagian integral dari identitas nasional, sehingga tercipta harmoni antara bahasa Indonesia sebagai pemersatu dan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya.

Kebijakan Bahasa Asing

Kebijakan bahasa asing di Indonesia dibentuk sebagai respons terhadap realitas globalisasi dan kebutuhan akan penguasaan bahasa internasional untuk memperkuat komunikasi global. Bahasa-bahasa asing seperti Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, dan Jerman diajarkan di berbagai lembaga pendidikan formal maupun nonformal untuk memperluas wawasan peserta didik dan meningkatkan daya saing nasional. Dalam dunia pendidikan, bahasa asing diajarkan sebagai mata pelajaran wajib seperti Bahasa Inggris atau sebagai pilihan, dengan kurikulum yang diselaraskan dengan standar global. Penguasaan bahasa asing menjadi jembatan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya global, sekaligus membuka peluang kerja dan kemitraan internasional. Namun, kebijakan ini juga mengatur pembatasan penggunaan bahasa asing dalam konteks tertentu untuk melindungi posisi utama bahasa Indonesia di ruang publik. Sebagai contoh, dalam iklan, papan nama, atau dokumen resmi, bahasa Indonesia harus digunakan terlebih dahulu, kemudian dapat disertai terjemahan bahasa asing. Kebijakan ini menjaga agar bahasa Indonesia tetap menjadi pengantar utama bangsa. Pemerintah juga mengawasi lembaga kursus dan pelatihan bahasa asing agar tidak menyimpang dari arah kebijakan nasional. Selain itu, penyusunan bahan ajar untuk pembelajaran bahasa asing harus memperhatikan nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal. Kebijakan bahasa asing berfungsi sebagai jembatan antara keterbukaan global dan perlindungan identitas nasional. Dalam sektor pendidikan tinggi dan lapangan kerja, penguasaan bahasa asing menjadi syarat penting untuk menghadapi persaingan internasional. Karena itu, pembelajaran bahasa asing diarahkan pada kepentingan strategis seperti diplomasi, perdagangan luar negeri, pertahanan, pariwisata, dan pertukaran keilmuan. Praktiknya, pemerintah mendorong pelaksanaan tes kecakapan bahasa asing seperti TOEFL, IELTS, JLPT, dan HSK, serta menjalin kerja sama dengan lembaga internasional untuk meningkatkan mutu pengajaran. Meski demikian, penggunaan bahasa asing yang berlebihan di ruang publik atau interaksi sosial tetap diawasi agar tidak mereduksi peran

bahasa Indonesia. Kesadaran bahwa menguasai bahasa asing tidak berarti mengabaikan kebanggaan terhadap bahasa sendiri perlu terus ditanamkan. Dengan demikian, kebijakan bahasa asing bersifat bukan hanya praktis tetapi juga ideologis, karena turut memperkuat posisi bangsa dalam arus globalisasi tanpa kehilangan jati diri nasional.

Kebijakan Bahasa Daerah

Kebijakan bahasa daerah merupakan bagian integral dari upaya pelestarian kebinekaan budaya di Indonesia. Negara Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia, mencapai lebih dari 700 bahasa. Bahasa daerah memiliki fungsi utama sebagai simbol identitas etnis, media ekspresi budaya lokal, serta alat komunikasi sehari-hari dalam komunitas.

Untuk menjaga keberlangsungan fungsi tersebut, pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan berbagai langkah strategis, seperti pemetaan, dokumentasi, revitalisasi, dan pelestarian bahasa daerah. Pemetaan meliputi pendataan jumlah penutur, sebaran geografis, dan vitalitas bahasa. Dokumentasi mencakup perekaman lisan, penulisan kamus, tata bahasa, serta sastra lisan. Sementara itu, revitalisasi dilakukan dengan mendorong penggunaan bahasa daerah di rumah, komunitas, dan lembaga pendidikan berbasis muatan lokal.

Kebijakan ini juga memberikan ruang bagi penggunaan bahasa daerah dalam konteks informal dan bahkan sebagai media pengantar di tingkat pendidikan dasar pada wilayah tertentu, terutama untuk memperkuat konsep bilingualisme atau trilingualisme. Namun demikian, bahasa Indonesia tetap dijadikan sebagai alat komunikasi lintas daerah dan sebagai bahasa pengantar utama di institusi formal. Dalam konteks ini, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga adat, serta komunitas penutur untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah. Tindakan afirmatif juga dilakukan bagi bahasa yang terancam punah melalui pendidikan komunitas, penerbitan buku anak-anak, hingga penyelenggaraan festival budaya berbasis bahasa daerah.

Dengan demikian, kebijakan bahasa daerah bukan hanya menjaga identitas lokal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penguat kohesi nasional. Penggunaan bahasa daerah sebagai ekspresi jati diri tidak boleh dipertentangkan dengan peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Sebaliknya, keduanya harus dipandang saling melengkapi dalam kerangka kebudayaan nasional yang inklusif. Namun, idealisme kebijakan tersebut tidak lepas dari tantangan nyata di lapangan. Salah satu persoalan terbesar adalah berkurangnya jumlah penutur muda, terutama akibat pergeseran bahasa ke bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antargenerasi yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, kebijakan bahasa daerah tidak hanya diarahkan pada pelestarian teknis, tetapi juga pada upaya menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa ibu. Hal ini penting agar bahasa daerah tetap relevan bagi generasi muda, sekaligus menjadi bagian integral dari pendidikan karakter dan literasi budaya.

Kebijakan Bahasa dalam Pendidikan

Bahasa memainkan peran sentral dalam dunia pendidikan sebagai medium utama pembelajaran. Kebijakan bahasa dalam pendidikan bertujuan untuk memastikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama dalam proses belajar-mengajar di semua jenjang pendidikan formal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Kebijakan ini mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam penyusunan buku ajar, kurikulum, administrasi sekolah, serta interaksi akademik. Buku-buku pelajaran dan modul pembelajaran diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar dan efektif. Di sisi lain, pengajaran bahasa asing seperti Inggris dan Arab serta bahasa daerah juga diatur dalam kebijakan ini sebagai pelengkap literasi multibahasa. Bahasa asing diajarkan untuk membuka wawasan global, sedangkan bahasa daerah untuk memperkuat akar budaya lokal. Kebijakan ini juga mencakup penguatan kompetensi literasi dan numerasi siswa melalui penggunaan bahasa Indonesia yang komunikatif dan kontekstual. Pendidik didorong untuk mengembangkan metode pengajaran yang berbasis pada keterampilan berbahasa, seperti membaca kritis, menulis argumentatif, dan berbicara efektif. Bahasa dalam pendidikan juga

digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan karakter. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang santun dan membangun dalam lingkungan pendidikan menjadi perhatian penting. Pemerintah mengawasi pelatihan guru bahasa, menyusun pedoman kebahasaan, dan mengembangkan materi ajar yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kebijakan ini juga memperhatikan teknologi pendidikan dengan menyediakan platform digital pembelajaran bahasa Indonesia dan aplikasi berbasis daring. Ini dilakukan agar bahasa Indonesia tetap adaptif dalam ruang digital dan mampu menjangkau peserta didik dari berbagai latar belakang.

Kebijakan Bahasa dalam Media

Media massa memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik dan sikap berbahasa masyarakat. Kebijakan bahasa dalam media bertujuan mengarahkan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan norma, etika, dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar di media cetak, elektronik, dan digital. Lembaga penyiaran seperti televisi dan radio diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam siaran berita, hiburan, maupun program edukatif. Penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah diperbolehkan, tetapi harus disesuaikan dengan konteks dan disertai terjemahan yang memadai. Kebijakan ini juga mengatur tata bahasa dan pilihan diksi dalam iklan, judul berita, serta isi program agar tidak menyesatkan, provokatif, atau menimbulkan kekacauan makna. Media online juga diawasi melalui regulasi terhadap konten berbahasa yang melanggar norma kebahasaan atau etika publik. Pemerintah bekerja sama dengan dewan pers, lembaga penyiaran publik, dan asosiasi media untuk menyusun pedoman berbahasa di media. Selain itu, pelatihan kebahasaan bagi jurnalis dan penyunting dilakukan untuk meningkatkan kualitas bahasa media. Media sosial sebagai ruang ekspresi publik juga menjadi perhatian. Meskipun bersifat bebas, penggunaan bahasa di media sosial tetap diarahkan agar tidak mengandung ujaran kebencian, hoaks, dan kekerasan verbal. Literasi digital dan literasi kebahasaan di kalangan pengguna media sosial menjadi bagian dari kebijakan ini. Melalui kebijakan ini, diharapkan media tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga sarana edukasi bahasa dan pembentuk budaya tutur yang sehat dalam masyarakat.

Kebijakan Bahasa dalam Hukum dan Administrasi Negara

Kebijakan bahasa dalam bidang hukum dan administrasi negara menegaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang wajib digunakan dalam seluruh aktivitas pemerintahan, legislasi, yudikatif, serta layanan publik. Hal ini dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 serta peraturan turunannya yang mengatur pemakaian bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara dan komunikasi pemerintahan. Dalam konteks hukum, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, surat keputusan, kontrak, surat perjanjian, serta akta-akta hukum. Penggunaan bahasa Indonesia harus konsisten dan tunduk pada struktur serta terminologi hukum yang tepat, agar tidak menimbulkan multiinterpretasi. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan pedoman dan glosarium hukum berbahasa Indonesia sebagai rujukan. Dalam praktik administrasi negara, seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi, surat-menyurat, laporan, notulensi, serta komunikasi lisan dan tulisan di ruang publik. Pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, perizinan, dan pengaduan masyarakat juga harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang komunikatif dan mudah dipahami. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas warga negara terhadap layanan hukum dan administrasi negara. Penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan jelas memungkinkan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka secara adil, serta menghindari ketimpangan pemahaman antara aparat dan warga. Tantangan dalam kebijakan ini

meliputi kebutuhan padanan istilah asing dalam ranah hukum dan administrasi, serta praktik penggunaan bahasa asing dalam dokumen kerja sama internasional. Oleh karena itu, penerjemahan hukum dan penggunaan terjemahan resmi menjadi bagian penting dari implementasi kebijakan ini.

Kebijakan Bahasa di Ranah Internasional

Sebagai bagian dari strategi diplomasi budaya dan penguatan identitas nasional, kebijakan bahasa Indonesia di ranah internasional bertujuan mengangkat status bahasa Indonesia sebagai bahasa global. Pemerintah mendorong internasionalisasi bahasa Indonesia melalui program pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA), kerja sama antarnegara, serta promosi budaya Indonesia di luar negeri. Program BIPA diselenggarakan di berbagai negara melalui kerja sama antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga pendidikan internasional. Pengajaran BIPA mencakup kurikulum, pelatihan pengajar, serta penyediaan buku ajar dan materi digital. Mahasiswa, diplomat, peneliti, serta masyarakat umum dari berbagai negara menjadi sasaran utama program ini. Kebijakan ini juga mendorong pembukaan pusat studi Indonesia di universitas asing, penyelenggaraan konferensi bahasa dan budaya Indonesia, serta peluncuran platform pembelajaran daring untuk menjangkau lebih luas pengguna global. Bahasa Indonesia diposisikan sebagai bahasa strategis di kawasan Asia Tenggara, seiring meningkatnya peran Indonesia dalam diplomasi regional dan global. Selain itu, kebijakan ini mencakup penguatan kehadiran bahasa Indonesia di organisasi internasional, forum diplomatik, dan perjanjian antarnegara. Dokumen-dokumen kerja sama yang melibatkan Indonesia wajib mencantumkan versi dalam bahasa Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas kedaulatan linguistik. Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk menyebarkan bahasa Indonesia secara global, tetapi juga sebagai alat *soft power* untuk memperkenalkan nilai-nilai, budaya, dan pemikiran Indonesia kepada dunia. Melalui diplomasi kebahasaan ini, Indonesia ingin menegaskan identitasnya di tengah arus globalisasi tanpa kehilangan akar budaya sendiri. Tantangan kebijakan ini adalah keterbatasan jumlah pengajar BIPA, rendahnya visibilitas bahasa Indonesia di kancah internasional, serta persaingan dengan bahasa global lain seperti Inggris, Mandarin, atau Arab. Oleh karena itu, strategi promosi yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.

Eksplorasi pendidikan nasional mengacu pada pemahaman mendalam tentang sistem pendidikan di Indonesia, termasuk tujuannya, prinsipnya, dan tantangan yang dihadapi. Eksplorasi ini dapat melibatkan berbagai aspek seperti kebijakan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, peran guru dan siswa, serta dampak pendidikan terhadap pembangunan bangsa.

Aspek-aspek eksplorasi pendidikan nasional meliputi:

Eksplorasi Rapor Pendidikan

Eksplorasi Penyebab Masalah dalam Pendidikan

Eksplorasi Biografi Tokoh Pendidikan Nasional

Eksplorasi Rapor Pendidikan

Rapor Pendidikan merupakan sebuah terobosan kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam rangka mereformasi sistem evaluasi pendidikan di Indonesia. Inisiatif ini menggantikan metode evaluasi tradisional yang terlalu terpaku pada nilai Ujian Nasional atau hasil akhir akademik. Melalui platform tersebut, satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat diberikan kesempatan untuk meninjau secara menyeluruh kondisi serta mutu pendidikan dari berbagai sisi. Rapor

Pendidikan menyajikan informasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional yang disusun oleh Kemendikbudristek, meliputi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Ketiga alat ini memberikan pandangan yang utuh terhadap tiga aspek penting, yaitu kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, penguatan karakter siswa, serta iklim pembelajaran di satuan pendidikan. Pengkajian terhadap Rapor Pendidikan memberikan wawasan yang lebih luas terhadap hambatan dan keberhasilan pendidikan di setiap level dan wilayah. Sebagai contoh, rapor dapat mengindikasikan bahwa tingkat literasi di suatu wilayah rendah meskipun tingkat kelulusan tinggi. Hal ini menjadi sinyal bahwa terdapat perbedaan signifikan antara keberhasilan administratif dan kualitas pembelajaran nyata. Oleh karena itu, rapor tidak sekadar menjadi sumber data, tetapi juga berfungsi sebagai alat analisis dan intervensi yang berbasis bukti. Rapor Pendidikan juga memungkinkan analisis perbandingan antardaerah, antarjenjang, bahkan antar sekolah dalam kategori yang sama. Data ini bisa dijadikan pijakan bagi kepala sekolah, guru, dinas pendidikan, maupun pihak terkait lainnya dalam menyusun rencana perbaikan pendidikan yang terukur dan kontekstual. Lebih jauh, Rapor Pendidikan dirancang untuk menegakkan nilai transparansi, tanggung jawab publik, dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan. Orang tua dan publik dapat terlibat dalam proses pemantauan serta memberi dukungan kepada sekolah dengan memanfaatkan informasi yang valid. Kendati demikian, masih ada kendala dalam pemanfaatan data rapor ini. Banyak sekolah serta pemda yang belum maksimal dalam menjadikan informasi dari Rapor Pendidikan sebagai dasar kebijakan. Beberapa hambatan teknis yang muncul antara lain kurangnya pelatihan pengguna sistem atau keterbatasan akses teknologi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Dengan kata lain, eksplorasi Rapor Pendidikan bukan sekadar membaca angka, melainkan bagaimana informasi tersebut dapat diubah menjadi strategi konkret dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata di seluruh pelosok negeri.

Eksplorasi Penyebab Masalah dalam Pendidikan

Permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Penelusuran mendalam terhadap sumber utama persoalan pendidikan mengungkap bahwa isu ini tidak hanya berasal dari ranah teknis pembelajaran, tetapi juga menyangkut unsur sosial, ekonomi, budaya, kebijakan politik, dan sistem pengelolaan lembaga. Salah satu akar persoalan terbesar ialah ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan pada umumnya memperoleh akses lebih baik terhadap sumber daya, tenaga pengajar, serta sarana pembelajaran. Sebaliknya, sekolah-sekolah di pelosok negeri harus menghadapi kekurangan guru, kondisi infrastruktur yang buruk, serta keterbatasan pendanaan. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan capaian belajar yang akhirnya berdampak pada ketidakmerataan kesempatan pendidikan lanjutan maupun pekerjaan. Penyebab lain yang signifikan adalah masalah kualitas guru dan pembelajaran. Meski jumlah guru di Indonesia sudah cukup secara kuantitatif, tetapi kemampuan profesional dan pedagogis mereka masih menjadi tantangan. Banyak pendidik belum terampil dalam mengelola pembelajaran aktif, menerapkan pendekatan berdiferensiasi, atau melaksanakan asesmen formatif. Hal ini juga diperburuk oleh proses rekrutmen guru yang masih belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan meritokrasi. Kurikulum yang terlalu padat dan kurang kontekstual menjadi faktor lain yang menghambat efektivitas pembelajaran. Banyaknya materi membuat siswa sulit mendalami suatu topik secara utuh. Padahal, pendidikan masa kini menuntut penguasaan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Dalam aspek pengelolaan, sistem birokrasi pendidikan yang rigid dan sentralistik membatasi ruang inovasi di tingkat sekolah maupun daerah. Belum semua kepala sekolah mampu berperan sebagai pemimpin pembelajaran. Selain itu, kelemahan dalam pengelolaan anggaran pendidikan

membuat berbagai program peningkatan mutu tidak berjalan maksimal. Ada pula faktor eksternal berupa kondisi sosial ekonomi keluarga. Anak-anak dari keluarga miskin atau kurang berpendidikan sering kali mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran secara optimal, terlebih di era digital. Ketimpangan ini menciptakan siklus ketidakadilan pendidikan yang berulang lintas generasi. Terakhir, rendahnya budaya literasi di lingkungan sekolah maupun masyarakat semakin memperparah masalah pendidikan. Minimnya kebiasaan membaca dan berdiskusi kritis menyebabkan rendahnya kemampuan pemahaman teks, yang menjadi fondasi utama dalam proses belajar. Menganalisis secara komprehensif berbagai penyebab masalah ini penting untuk menyusun kebijakan pendidikan yang kontekstual, solutif, dan berkeadilan, sehingga transformasi pendidikan menjadi kenyataan, bukan sekadar jargon.

Eksplorasi Biografi Tokoh Pendidikan Nasional

Menelusuri biografi tokoh pendidikan nasional bukan sekadar upaya mengenang sejarah, tetapi juga sarana untuk meneladani nilai-nilai pendidikan yang tetap relevan bagi pembangunan bangsa saat ini. Melalui pemikiran, perjuangan, dan karya para tokoh, kita dapat memahami landasan filosofis dan moral yang membentuk arah sistem pendidikan Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Ki Hadjar Dewantara, R.A. Kartini, Mohammad Syafei, dan Dewi Sartika memberikan kontribusi besar terhadap dunia pendidikan, terutama pada masa penjajahan yang penuh diskriminasi, dan warisan gagasan mereka hingga kini masih menjadi rujukan dalam pembaruan pendidikan nasional.

Ki Hadjar Dewantara, yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, dilahirkan dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat pada 2 Mei 1889. Ia mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta dengan pandangan bahwa pendidikan seharusnya membebaskan manusia, bukan mengekangnya. Filosofinya tertuang dalam semboyan: Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, yang menggambarkan peran guru sebagai panutan, penyemangat, sekaligus pendukung siswa. Sistem pendidikan Taman Siswa tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga budi pekerti, semangat kebangsaan, dan pemberdayaan rakyat. Ki Hadjar juga vokal menentang sistem pendidikan kolonial yang eksklusif hanya untuk kalangan elite. Melalui tulisan dan aktivitas jurnalistik, ia menyuarakan pentingnya pendidikan bagi semua kalangan.

Sosok lain yang patut dikenang adalah R.A. Kartini, pelopor pendidikan bagi kaum perempuan. Dalam surat-menyuratnya dengan sahabat-sahabatnya di Belanda, ia menyampaikan kegelisahan terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan pribumi. Kartini kemudian mendirikan sekolah perempuan di Jepara yang kelak menginspirasi banyak inisiatif serupa di berbagai daerah.

Dewi Sartika, tokoh pendidikan perempuan asal Sunda, juga berperan penting melalui pendirian Sekolah Istri di Bandung pada 1904. Sekolah ini menjadi cikal bakal pendidikan perempuan modern di Indonesia dengan kurikulum mencakup baca tulis, berhitung, tata krama, serta pengetahuan umum.

Sementara itu, Mohammad Syafei, pendiri INS Kayutanam di Sumatra Barat, memelopori pendidikan berbasis praktik dan budaya lokal. Sekolah yang ia dirikan menggabungkan pendidikan akademik dengan keterampilan hidup seperti pertanian, kesenian, dan kerajinan. Prinsipnya yang terkenal adalah: "Ajarkan anak-anak dengan hal-hal yang ada di sekitar mereka."

Eksplorasi terhadap biografi tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia bertumbuh dari semangat perlawanan, kepedulian sosial, serta akar budaya bangsa. Mereka bukan hanya panutan masa lalu, tetapi juga pondasi nilai dan filosofi yang dapat dijadikan inspirasi dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional di era kini.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan bahasa di Indonesia mencakup berbagai aspek strategis yang saling terkait dan saling mendukung dalam menjaga jati diri bangsa, memperkuat daya saing global, serta melestarikan keragaman budaya. Kebijakan bahasa nasional menegaskan posisi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, simbol identitas nasional, dan sarana utama komunikasi resmi di semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan bahasa asing diarahkan untuk meningkatkan kompetensi global masyarakat Indonesia tanpa mengurangi peran utama bahasa Indonesia di ruang publik dan pendidikan. Sementara itu, kebijakan bahasa daerah difokuskan pada pelestarian, revitalisasi,

dan pengakuan hak masyarakat adat atas bahasa ibu mereka, sehingga tercipta keseimbangan antara identitas lokal dan nasional. Dalam bidang pendidikan, kebijakan bahasa memastikan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar utama, didukung oleh pengajaran bahasa asing dan bahasa daerah untuk membentuk masyarakat multibahasa yang berwawasan global sekaligus berakar pada budaya lokal. Penggunaan bahasa Indonesia di media diatur agar tetap sesuai norma dan etika, membangun budaya tutur yang sehat, serta melawan penyalahgunaan bahasa di ruang publik digital. Pada ranah hukum dan administrasi negara, kebijakan bahasa menegaskan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam seluruh dokumen dan komunikasi resmi demi menjamin keadilan, aksesibilitas, dan transparansi layanan publik. Di tingkat internasional, kebijakan bahasa diarahkan untuk mengangkat status bahasa Indonesia sebagai bahasa global melalui berbagai program pengajaran, diplomasi budaya, dan promosi di kancah dunia. Secara keseluruhan, kebijakan bahasa di Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang literat, berkeadilan, mampu bersaing secara global, namun tetap kokoh dalam identitas nasional dan kebinekaan budaya

5. Penutup

Eksplorasi menunjukkan bahwa kebijakan bahasa di Indonesia berfungsi strategis dalam memperkuat identitas nasional, menjaga keberagaman budaya, serta meningkatkan daya saing global. Kebijakan bahasa nasional menegaskan peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dan sarana komunikasi resmi. Kebijakan bahasa asing dan daerah disusun untuk menciptakan masyarakat multibahasa yang terbuka secara global namun tetap berakar pada budaya lokal. Di sisi lain, pendidikan nasional menghadapi tantangan ketimpangan mutu, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya literasi, namun reformasi melalui Rapor Pendidikan dan inspirasi dari tokoh-tokoh nasional memberi arah perubahan yang konstruktif. Sinergi antara kebijakan bahasa dan pendidikan menjadi kunci utama dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkeadilan, dan berdaya saing dalam kerangka keindonesiaan.

Daftar Pustaka

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2020). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kemdikbud.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021). *Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2021*. Jakarta: Kemdikbudristek.
- Dalimunte, A. A. (2016). Implementasi kebijakan bahasa dan implikasinya dalam penguatan identitas, integritas, dan pluralitas bangsa. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 2(1).
- Jendra, H. (2010). *Sikap Bahasa dan Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kemendikbud. (2018). *Buku Saku Gerakan Literasi Nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kemendikbudristek Republik Indonesia. (2018). *Panduan Implementasi Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Mahsun. (2014). *Bahasa Indonesia dalam Kebijakan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rochmiyati, S. (2015). Kebijakan pendidikan bahasa Indonesia dalam perspektif pendidikan nasional. Caraka: *Jurnal Ilmu Kebahasaan, Kesastraan, dan Pembelajarannya*, 1 (2), 3-13
- Rohani, Imam. "Kajian Kebijakan Pendidikan Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan
- Sugono, D. (2011). *Kebijakan Bahasa Nasional*. Jakarta: *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*.